

**EFEKTIVITAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP
(LTSA) KOTA BATAM DALAM MENEKAN JUMLAH
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILLEGAL
DI LUAR NEGERI**

**Felicia
1651069**

ABSTRAK

Di zaman era globalisasi ini, banyak Warga Negara Indonesia yang memilih untuk bekerja luar negeri karena terbatasnya lapangan kerja. Akan tetapi, banyak pekerja migran yang belum mengantongi izin sebagai pekerja migran legal. Untuk menekan jumlah pekerja migran ilegal Pemerintah kemudian membentuk Layanan Terpadu Satu Atap disejumlah tempat di Indonesia, salah satunya di Kota Batam. LTSA ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Akan tetapi, LTSA Kota Batam masih dianggap belum optimal (tidak efektif) oleh BNP3TKI. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam terhadap Pekerja Migran dan upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang disusun dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Semua data yang didapatkan dianalisa dan diolah oleh penulis. Setelah itu, akan ditafsir kesimpulan dari hubungan dengan penelitian ini, dan akan dijabarkan secara deskriptif mengenai Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam menekan jumlah Pekerja Migran Ilegal di luar Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan LTSA di Kota Batam belum optimal atau belum efektif karena pelaksanaan dalam proses perizinan pekerja migran terdapat sejumlah kendala yaitu dalam faktor hukum (belum ada peraturan daerah yang mengatur), faktor penegak hukum (masih ada instansi terkait yang belum menugaskan anggotanya di kantor LTSA), faktor masyarakat (kurangnya kesadaran untuk menjadi TKI sesuai prosedur), dan faktor kebudayaan (kurangnya kerja sama antar instansi dan masyarakat untuk mewujudkan nilai kemitraan). Kemudian, untuk mengatasi kendala-kendala, upaya yang dapat dilakukan antara lain, diperlukan Peraturan Gubernur atau Peraturan tingkat provinsi yang bisa mengikat, mengatur dan melakukan koordinasi dari berbagai instansi yang terlibat dalam satu payung, peningkatan kinerja instansi, pemberian pelatihan, pemberian sanksi, dan evaluasi.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Pekerja Migran Ilegal, Layanan Terpadu Satu Atap